

KLIPING BERITA KETAHANAN PANGAN

3 FEBRUARI 2022

Afnidar Afnidar

[NAMA PERUSAHAAN] [Alamat perusahaan]

Daftar Isi

Pemerintah diharap segera tetapkan Kepala Badan Pangan Nasional.....	2
Masih Proses Pembentukan, Bapanas Bakal Pegang Kendali Penuh Perum Bulog.....	4
Otoritas Bulog Berpindah dari Kementerian BUMN ke Badan Pangan Nasional (BPN)	7
Bulog Bakal Tidak Lagi Dibawah Otoritas Kementerian BUMN	8
Alasan Kemendag Belum Perbarui Harga Acuan di Tengah Tren Kenaikan.....	9
Jokowi Harus Segera Tunjuk Kepala Badan Pangan Nasional.....	11
Wakil Bupati Serang sampaikan dua raperda perkuat ketahanan pangan.....	14
Program Ketahanan Pangan di Kotim Harus Diprioritaskan	16
Kementerian Pertanian Pastikan Stok Pangan Aman	18
Bansos Matikan Fungsi Lumbung Pangan di Dukuh Kutukan Sragen.....	19
Gelar pangan murah TTI memudahkan masyarakat HSS penuhi kebutuhan pokok	21
Belajar Mengelola Pangan dari Kampung Adat Ciptagelar, Tradisi yang Sudah Berjalan Ratusan Tahun	22
Cadangan Pangan Pemkot Sukabumi di Tahun 2022 Alami Penurunan.....	23
Antisipasi Kerawanan Pangan, DKP3 Sediakan CPP dan Akan Menganangkan Metode IP 400	24
Minyak Goreng di Lampung Habis karena Kendala Distribusi	25
DKP3 Kota Sukabumi: CPP Diperuntukkan Bagi Korban Bencana Alam dan Antisipasi Kerawanan Pangan	27
Percepat Pemulihan Ekonomi, Banyuwangi Berdayakan Warga Lewat 'Sistersay'	28
Cegah Stunting, Pemkab Muara Enim Canangkan Kerja Sama dengan SEAMEO RECFON.....	30

Pemerintah diharap segera tetapkan Kepala Badan Pangan Nasional

<https://www.antaraneews.com/berita/2682645/pemerintah-diharap-segera-tetapkan-kepala-badan-pangan-nasional>

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah diharapkan segera menetapkan Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) beserta anggotanya agar badan yang baru dibentuk tersebut bisa segera menjalankan tugas dengan mengintegrasikan kewenangan dari berbagai kementerian lembaga yang sudah ada.

"Bapak Presiden RI untuk segera membentuk kepala dan anggota dalam struktur organisasi Bapanas. Supaya antar-lembaga tidak saling tengkar ataupun menyalahkan jika terjadi persoalan stabilitas pasokan dan harga," kata Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (Pataka) Ali Usman di Jakarta, Kamis.

Ia mengingatkan fluktuasi pasokan dan harga bahan pokok sering kali terjadi pada momen hari keagamaan besar seperti Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru. Menurut Ali, BUMN Holding Pangan dan Perum Bulog juga perlu melakukan aksi kolaborasi untuk menjaga keseimbangan stabilisasi pasokan dan harga.

Beberapa upaya yang perlu dilakukan dengan mekanisme kerja sama produksi, penyerapan produk di petani, penguasaan barang untuk komersial dan cadangan pangan pemerintah, hingga stok operasi pasar. "Sehingga menciptakan ekosistem stabilisasi pasokan dan harga pangan baik tingkat produsen hingga diterima tangan konsumen," katanya.

Undang-Undang Nomor 7/2014 Tentang Perdagangan Pasal 25 Ayat (1) Stabilisasi Harga dan Bapokting merupakan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugas tersebut Menteri Perdagangan memiliki tiga kewenangan Pasal 26 Ayat 3 dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga bapokting.

Menteri menetapkan kebijakan harga, pengadaan stok dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor. "Jadi ketiga kewenangan inilah dilimpahkan kepada Bapanas sesuai Perpres 66/2021," kata Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim. Karim menyampaikan dari 11 bapokting hanya sembilan bahan pangan yang kewenangannya dilimpahkan kepada Bapanas.

Salah satu kewenangannya yaitu stabilisasi harga dalam penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), harga acuan dan harga khusus. Untuk kenaikan harga yang cukup signifikan pada

beberapa komoditas seperti ayam, telur, jagung, dan gula, Kementerian Perdagangan sudah tidak lagi mengampunya.

"Ada dilema di Kemendag dalam rangka menetapkan kebijakan harga untuk komoditi yang tidak diserahkan adalah tepung terigu, minyak goreng, dan ikan segar. Jadi ini masih tertinggal di kami. Untuk minyak goreng, kami masih menetapkan HET seperti Permendag Nomor 6/2022. Sementara untuk harga acuan sebagaimana diatur Permendag 07/2020. Kami mengalami kegalauan karena secara legal tidak bisa melakukan kewenangan peraturan tersebut," kata dia.

Masih Proses Pembentukan, Bapanas Bakal Pegang Kendali Penuh Perum Bulog

<https://www.republika.co.id/berita/r6q5wl349/masih-proses-pembentukan-bapanas-bakal-pegang-kendali-penuh-perum-bulog>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang masih dalam proses pembentukan akan memegang kendali dalam kebijakan pangan nasional sekaligus operasional Perum **Bulog** sebagai pelaksana kebijakan. Diharapkan, dengan kebijakan pangan yang terpusat akan memudahkan kerja Bulog sebagai kepanjangan tangan pemerintah dalam upaya stabilisasi harga pangan.

Direktur Supply Chain Bulog, Mokhamad Suyamto mengatakan, secara korporasi Bulog memang masih di bawah Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebagai lembaga yang mengurus perusahaan pelat merah.

"Namun, terkait kebijakan, Menteri BUMN akan memberikan kuasa kepada **Bapanas** untuk menugaskan Bulog dalam kebijakan pangan nasional," kata Suyamto dalam Webinar Pataka, Kamis (2/3/2022).

Secara struktur kelembagaan, ia menjelaskan, posisi Bulog akan berada tepat di bawah Bapanas. Namun, Bulog tetap akan bekerja sama dengan BUMN sektor pangan lainnya yang kini telah bergabung menjadi BUMN Holding pangan ID Food.

Menurutnya, dengan pola tersebut, kebijakan pangan yang dijalankan oleh Bulog dapat lebih terintegrasi dari hulu ke hilir. Saat ini ia menegaskan setidaknya ada tujuh kementerian terkait yang menjadi regulator kebijakan pangan dan Bulog menjadi operator untuk menjalankan kebijakan itu.

"Harapannya setelah Bapanas berdiri, kebijakan pangan lebih terintegrasi sehingga pelaksanaan tugas-tugas bidang pangan bisa baik. Upaya ketersediaan dan stabilisasi pangan akan lebih berjalan efektif," katanya.

Diketahui, berdasarkan Perpres Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, ada sembilan komoditas pangan yang menjadi wewenang dari Bapanas. Di antaranya beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.

Suyanto menuturkan, Bulog telah menyusun berbagai model pengelolaan sembilan komoditas tersebut. Namun, yang pasti pengelolaan tak hanya dilakukan pada tingkat hilir, namun juga di level produsen yang bertalian erat dengan para petani.

Dalam hal pengelolaan cadangan pangan, BUlog meminta harus adanya penyaluran cadangan pangan secara rutin. Seperti dalam program bantuan sosial pemerintah, stabilisasi harga, atau disposal stok. Disposal umumnya berupa pemusnahan cadangan pangan yang sudah melewati jangka waktu penyimpanan maksimal atau dijual dengan harga murah untuk diolah menjadi bahan non pangan.

"Opsi disposal stok itu harus ada manakala saluran penyaluran pasokan pangan terbatas tapi ini harus bisa dihindari ketika kita punya pasar," kata dia.

Di satu sisi, Bulog juga mengusulkan adanya cadangan anggaran pangan selain cadangan pangan itu sendiri. Cadangan anggaran dibutuhkan untuk komoditas pangan yang tidak memiliki usia simpan dalam waktu lama. Dengan begitu anggaran tersebut dapat digunakan sewaktu-waktu jika komoditas yang mudah rusak membutuhkan intervensi harga agar stabil.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron, mengatakan, dengan posisi Bulog yang berada di bawah Bapanas,

ada kemungkinan ke depan para direksi Bulog akan ditentukan langsung oleh Bapanas.

Namun, untuk saat ini, ia mengungkapkan belum ada keputusan lebih lanjut mengenai pimpinan Bapanas yang akan ditunjuk. "Bagaimana pola kerjanya? Sampai sekarang belum karena biasanya personalia tersusun dahulu. Setelah itu baru diarahkan sesuai Perpres 66 Tahun 2021," kata dia.

Otoritas Bulog Berpindah dari Kementerian BUMN ke Badan Pangan Nasional (BPN)

<https://www.suara.com/bisnis/2022/02/03/163045/otoritas-bulog-berpindah-dari-kementerian-bumn-ke-badan-pangan-nasional-bpn>

Suara.com - Dalam waktu dekat, Perum **Bulog** tidak lagi berada di bawah naungan **Kementerian BUMN**, dan menjadi kewenangan otoritas **Badan Pangan Nasional** (BPN).

“Bulog pada akhirnya nanti akan dibawah BPN bulog bukan lagi dibawah otoritas Kementerian BUMN Tetapi akan disubkoordinasikan menjadi operatornya badan pangan nasional sesuai dengan Perpres 66 yang mengamankan demikian,” Kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron Dalam Webinar Virtual, Kamis (3/2/2022).

Berkaitan dengan pola kerja nantinya, phak terkait hingga kini masih menyusun dan merencanakan sejumlah strategi.

“Belum ada, karena bisanya personalia dulu tersusun baru dibuatkan arah dan tujuan serta implementasi dari perpres ini yang diwujudkan pada peraturan-peraturan BPN Yang secara teknis akan mengatur,” kata dia.

Badan Pangan Nasional atau BPN dalam waktu dekat akan mengajukan deretan direksi Bulog dan struktural dan roadmap guna semakin memajukan industri pangan dalam negeri.

“Jangan sampai signal kenaikan pangan dan komoditas naik di pasaran bisa menjadi langka, akibat apa pasti banyak yang harus dilakukan penelusuran dari hulu ke hilir misalnya persoalan CPO dan lain sebagainya,” tutupnya.

Bulog Bakal Tidak Lagi Dibawah Otoritas Kementerian BUMN

<https://www.idxchannel.com/economics/bulog-bakal-tidak-lagi-dibawah-otoritas-kementerian-bumn>

IDXChannel - Perum **Bulog** nantinya tidak lagi akan berada di bawah koordinasi Kementerian BUMN. Bulog akan langsung berada di bawah otoritas **Badan Pangan Nasional (BPN)**.

Hal tersebut seperti diungkapkan, Anggota Komisi VI DPR, Herman Khaeron. Ia mengatakan, kedepan perusahaan Bulog bukan merupakan holding atau perusahaan yang dibawah otoritas Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN.

Herman Khaeron megatakan pihaknya telah berkomunikasi bersama Kementerian BUMN dan untuk secara operasional dan operatornya okeh Badan Pangan Nasional atau BPN.

“Bulog pada akhirnya nanti akan dibawah BPN bulog bukan lagi dibawah otoritas Kementerian BUMN Tetapi akan disubkoordinandi menjadi operatornya badan pangan nasional sesuai dengan Perpres 66 yang mengamanahkan demikian,” Kata Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron Dalam Webinar Virtual, Kamis (3/2/2022).

Untuk Bagaimana pola bekerja sampai saat ini pihaknya masih menyusun dan merencanakan sejumlah langkah strategi kedepan.

“Belum ada, karena bisanya personalia dulu tersusun baru dibuatkan arah dan tujuan serta implementasi dari perpres ini yang diwujudkan pada peraturan-peraturan BPN Yang secara teknis akan mengatur,” Tambahnya.

Kedepan untuk direksi Bulog dapat ditentukan oleh Badan Pangan Nasional atau BPN. Bagaimana struktural dan roadmaps bisa diimplementasikan untuk melindungi hajat hidup atas pangan di Indonesia.

“Jangan sampai signal kenaikan pangan dan komoditas naik di pasaran bisa menjadi langka, akibat apa pasti banyak yang harus dilakukan penelusuran dari hulu ke hilir misalnya persoalan CPO dan lain sebagainya,” tutupnya.
(RAMA)

Alasan Kemendag Belum Perbarui Harga Acuan di Tengah Tren Kenaikan

<https://www.republika.co.id/berita/r6q6pd349/alasan-kemendag-belum-perbarui-harga-acuan-di-tengah-tren-kenaikan>

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sejumlah harga pangan pokok mengalami kenaikan harga imbas naiknya komponen biaya produksi. Di tengah tekanan kenaikan harga itu, Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih belum memperbarui acuan harga pangan.

Direktur Bahan Pokok dan Penting, Kemendag, Isy Karim, mengatakan, sejumlah pangan pokok telah mengalami kenaikan harga dan tidak sesuai acuan harga seperti daging dan telur ayam ras, gula, jagung, termasuk beras. Kenaikan harga-harga itu karena biaya produksi yang tidak dapat dibendung sehingga berdampak pada pembentukan harga di level konsumen.

"Contohnya seperti gula, acuannya itu Rp 12.500 per kg tapi rata-rata saat ini sudah Rp 13 ribu-Rp 14 ribu per kg. Nah ini ada dilema di **Kemendag** dalam menetapkan kebijakan harga yang baru," kata Isy Karim dalam Webinar Pataka, Kamis (3/2/2022).

Dilema itu lantaran harga-harga pangan yang mengalami kenaikan tersebut akan menjadi wewenang dari Badan Pangan Nasional (Bapanas). Adapun acuan harga pangan saat ini diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 7 Tahun 2020 tentang **Harga Acuan Pembelian** di Tingkat Petani dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen

Sebagaimana diketahui, sesuai Perpes Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, sembilan pangan yang di atur

antara lain beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang, telur unggas, daging ruminansia, daging unggas, dan cabai.

"Kalau kami tetapkan harga acuan yang baru, dikhawatirkan akan menjadi cacat hukum," ujarnya. Apalagi, sesuai mandat dalam perpres tersebut, Bapanas harus terbentuk pada tahun ini.

Namun, di luar komoditas itu Kemendag masih memiliki wewenang penuh. Seperti misalnya untuk minyak goreng di mana Kemendag telah melakukan sejumlah intervensi untuk menurunkan harga dari hulu ke hilir. "Itu kami bisa tetapkan bahkan dengan harga eceran tertinggi (HET)," ujar Isy Karim.

Isy Karim melanjutkan, melihat dinamika harga pangan yang tengah fluktuatif, pihaknya tengah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian. Terutama untuk dapat melakukan intervensi kebijakan dalam stabilisasi harga pangan yang masuk dalam wewenang **Bapanas** hingga nanti terbentuk.

Jokowi Harus Segera Tunjuk Kepala Badan Pangan Nasional

3 Februari, 2022

<https://www.agrofarm.co.id/2022/02/jokowi-harus-segera-tunjuk-kepala-badan-pangan-nasional/>

Agrofarm.co.id-Undang-Undang No.7 tahun 2014 Tentang Perdagangan Pasal 25 Ayat menyebutkan bahwa stabilisasi harga dan bahan pokok dan penting (Bapokting) merupakan tugas pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam menjalankan tugas tersebut, Menteri Perdagangan memiliki 3 kewenangan Pasal 26 Ayat 3 dalam menjamin pasokan dan stabilisasi harga Bapokting, menteri menetapkan kebijakan harga, pengadaan stock dan logistik, serta pengelolaan ekspor dan impor.

“Jadi ke tiga kewenangan inilah dilimpahkan kepada Badan Pangan Nasional (Bapanas) sesuai Perpres 66/2021,” kata Isy Karim Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting), Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam Webinar PATAKA Menyoal Kewenangan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Jakarta, Kamis (03/2/2022).

Karim menyampaikan, dari 11 Bapokting dan hanya 9 Sembako kewenangan dilimpahkan kepada Bapanas. Salah satu kewenangan stabilisasi harga dalam penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET), harga acuan dan harga khusus.

Namun belakangan ada kenaikan cukup signifikan, seperti harga seperti ayam, telur dan jagung dan gula. Akan tetapi, Kemendag sudah tidak lagi mengampu komoditas tersebut.

“Ada dilema di Kemendag dalam rangka menetapkan kebijakan harga untuk komoditi yang tidak diserahkan adalah tepung terigu, minyak goreng dan ikan segar. Jadi ini masih tertinggal di kami. Untuk minyak goreng, kami masih menetapkan HET seperti Permendag No 6/2022. Sementara untuk harga acuan sebagaimana diatur Permendag 07/2020. Kami mengalami kegalauan karena secara legal tidak bisa melakukan kewenangan peraturan tersebut,” ungkap dia.

Segera Bentuk Kepala

Sementara Direktur Eksekutif Pusat Kajian Pertanian Pangan dan Advokasi (PATAKA) Ali Usman mengatakan, Presiden RI Joko Widodo untuk segera membentuk Kepala dan Anggota dalam struktur organisasi Bapanas. Ini penting untuk antar lembaga tidak saling tengkar ataupun menyalahkan jika terjadi persoalan stabilitas pasokan dan harga.

Mengingat Gonjang-ganjing pasokan dan harga pada Sembilan bahan pokok (Sembako) sering kali terjadi pada momen Hari Keagamaan Besar Nasional seperti Idul Fitri, Natal dan

Tahun Baru. Sebentar lagi memasuki bulan puasa Ramadhan, jika terjadi instabilitas pasokan berkurang atau berlebih sehingga berdampak pada naik/turunnya harga pada komoditas sembako.

“Kemudian masyarakat konsumen dan produsen akan mengadu ke siapa kalau bukan Bapanas. Sebab kewenangan dari Kementerian dan lembaga terkait sudah diambil alih oleh Bapanas,” unjar Ali Usman.

Menurut dia, BUMN Holding Pangan dan Perum Bulog perlu melakukan aksi kolaborasi untuk menjaga keseimbangan stabilisasi pasokan dan harga baik.

“Dengan mekanisme kerjasama produksi, penyerapan produk di petani, penguasaan barang untuk komersial dan cadangan pangan pemerintah, stok operasi pasar. Sehingga menciptakan ekosistem stabilisasi pasokan dan harga pangan baik tingkat produsen hingga diterima tangan konsumen,” jelas dia.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPR RI, Herman Khaeron mengatakan, Bulog pada akhirnya dibawah Badan Pangan Nasional, bukan lagi dibawah otoritas BUMN. Tetapi subordinasi di bawah Bapanas sesuai Perpres 66/2021. Kemungkinan Direksi Bulog ditentukan Bapanas.

Ia menyebutkan sesuai UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 bahwa Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kepada rakyat. Seharusnya diwujudkan oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Kita kehilangan ekonomi Pancasila dan sudah masuk ekonomi liberalisasi. Padahal BUMN dahulu menguasai Perkebunan 60% dari jumlah perkebunan yang ada,” ujar dia.

“Presiden seharusnya bertanggung jawab terhadap seluruh persoalan bangsa, terutama soal pangan. Presiden harus bisa membaca dan mengembalikan Pasal 33 sehingga negara menjadi penyeimbang terhadap hajat hidup banyak masyarakat. Kalau mau bangun pangan atau Badan Pangan Nasional, harus sungguh jangan parsial, jangan bangun IKN (Ibu Kota Negara) di Kalimantan padahal uangnya tidak punya. Artinya masih banyak pilihan yang paling urgensi,” tegasnya.

Perlu Dasar Hukum

Untuk menanggapi hal tersebut, Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik Perum Bulog, Mokhamad Suyamto mengatakan, mempedomani ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 29 Perpres 66 Tahun 2021, maka perlu dasar hukum untuk penegasan pendelegasian wewenang dari Mendag, Mentan dan Kepala Bapanas dan penegasan pemberian kuasa dari Menteri BUMN dan Kepala Bapanas.

Sebelum adanya perpres 66 Bulog berhadapan sebanyak 7 Kementerian sebagai regulator, sehingga seringkali kebijakan pangan yang diberikan penugasan kepada bulog tidak terintegrasi hulu hilir.

“Dengan adanya Bapanas, harapannya semua kebijakan pangan sehingga pelaksanaan tugas kebijakan ketersediaan maupun stabilisasi akan berjalan lebih efektif,” kata dia.

Sesuai Perpres 48 Tahun 2016, bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional, Pemerintah menugaskan BUMN untuk menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen. Antara lain untuk komoditas Beras, Jagung, Kedelai, gula, minyak goreng, tepung terigu, bawang merah, cabe, daging sapi, daging ayam ras, dan telur ayam.

“Sampai dengan saat ini pengelolaan cadangan pangan pemerintah baru sebatas komoditas Beras. Untuk cadangan pangan yang lain, sampai saat ini Pemerintah tidak punya stok. Sehingga apabila terjadi gejolak kenaikan harga pemerintah tidak punya stok untuk melakukan stok operasi untuk stabilisasi harga pangan,” ungkap Suyamto.

Siap Menjalankan Tugas

BUMN Holding Pangan, Direktur Utama PT Rajawali Nasional Indonesia yang saat ini bertransformasi merubah nama menjadi PT ID Food, Arief Prasetyo Adi mengatakan, pembagian peran Perum Bulog dan ID Food.

“Karena kalau tidak diatur ada kemungkinan bisa bertabrakan. Sesuai Pasal 3C peran utama Bulog melaksanakan penugasan Pajale dengan mekanisme CSHP. Sedangkan penugasan lain secara komersial dimana BAPANAS untuk meminta tolong kepada BUMN untuk menugaskan ID Food dalam hal ini sebagai Holding Pangan,” jelas Arief.

Untuk stabilisasi, menggunakan dana pemerintah kewenangannya ada di Bulog, sedangkan ID Food membangun sistem bisnis dari hulu hilir.

“Ada catatan, BUMN tidak boleh rugi, artinya secara komersial dapat hitung dengan baik, berapa HPP, harga jual dengan margin yang wajar dan produk ini bisa tersampaikan kepada orang banyak,” tandas dia.

“Kami Bulog dan Holding Pangan siap menjalankan kebijakan ataupun penugasan pemerintah dalam rangka mewujudkan ketersediaan produk, keterjangkauan baik harga. Jadi ini kita melakukan bisnis yang murni dengan skema komersial. Begitupun dengan stok sesuai dengan kemampuan jual. Bedanya dengan Bulog misalnya punya stok 1 1,5 juta ton beras untuk stabilisator,” terang Arief. **Bantolo**

Wakil Bupati Serang sampaikan dua raperda perkuat ketahanan pangan

<https://banten.antaranews.com/berita/204641/wakil-bupati-serang-sampaikan-dua-raperda-perkuat-ketahanan-pangan>

Serang, Banten (ANTARA) - Wakil Bupati Serang Pandji Tirtayasa menyampaikan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) usulan Bupati Serang pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Serang, kedua usulan tersebut yakni Raperda tentang Penyelenggaraan Ketahanan Pangan dan Raperda tentang Pengelolaan Sungai.

“Kita perlu ada upaya hukum yang mendasari agar langkah - langkah kita bisa dipertanggungjawabkan secara hukum,” kata Pandji kepada wartawan usai Rapat Paripurna di Gedung DPRD Kabupaten Serang, Kamis (3/2/2022).

Pandji mengatakan, diusulkannya dua raperda tersebut merupakan kewajiban yang paling mendasar di Kabupaten Serang sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pertama terkait Raperda Ketahanan Pangan, Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Serang bertanggung jawab terhadap ketersediaan pangan, distribusi pangan, keterpenuhan standar gizi termasuk juga produksi-produksi pangan di daerah.

“Yang pasti ini menjadi tanggung jawab kita. Ketahanan pangan agar masyarakat itu bisa mengkonsumsi kebutuhan pangan sesuai dengan standar kebutuhan, termasuk standar gizi yang diperlukan masing-masing keluarga atau masing-masing perorangan,” ungkap Pandji. Meski demikian, sebut Pandji, bukan berarti selama ini tidak terpenuhi.

Hanya saja, Pemda Kabupaten Serang harus memiliki dasar hukum yang kuat untuk melaksanakan langkah-langkah yang diamanatkan undang-undang. “Karena kita hanya mengacu kepada peraturan Kementerian Pertanian.

Nah, harus kita jabarkan dengan langkah-langkah teknis yang lebih kongkrit di tingkat daerah, terutama kaitan dengan ketersediaan dan distribusi pangan,” terang Pandji. Kemudian yang kedua kaitan dengan Raperda tentang Pengelolaan Sungai. Kata Pandji, sungai secara penguasaan kewenangan di bawah Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC2).

Namun untuk sungai yang berada di wilayah Kabupaten Serang kondisinya memang relatif ada yang tercemar. “Nah (usulan raperda ini) agar bagian sungai ini bisa memberikan manfaat maksimal, yang optimal kepada masyarakat. Karena sungai itu sumber kehidupan, air adalah sumber kehidupan, bagaimana kita bisa memanfaatkan sungai secara optimal kepada masyarakat terutama kaitan dengan mengurangi pencemaran,” terangnya.

Oleh karena itu, dalam raperda tersebut kemungkinan ada sanksi-sanksi sampai ke penutupan atau nonaktifkan kegiatan industri jika sudah diperingatkan, namun masih membandel.

“Saat ini sungai Cidurian dan Ciujung tercemar limbah, tercemar limbah industri,” jelas Pandji. Pada kesimpulannya, tambah Pandji, usulan Raperda Tentang Pengelolaan Sungai bertujuan untuk melindungi sumber air, termasuk kalangan industri.

“Jadi raperda itu lebih ke titik berat di koordinatif karena yang punya kewenangan Balai Besar. Pada intinya juga pemda ikut bertanggung jawab dalam pemanfaatan dan kebersihan sungai,” tutur Pandji. Pada bagian lain, DPRD Kabupaten Serang juga menyampaikan dua macam raperda, yakni Raperda tentang Desa Wisata dan Raperda tentang Pendanaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Pesantren. Selanjutnya, seluruh raperda akan dilakukan pemandangan fraksi-fraksi di DPRD Kabupaten Serang.

Program Ketahanan Pangan di Kotim Harus Diprioritaskan

SAMPIT/TABENGAN-Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) M Abadi mendorong Pemerintah Kabupaten melalui instansi terkait dalam hal ini Dinas Ketahanan Pangan (DKP) setempat untuk terus memaksimalkan program ketahanan pangan di daerah ini.

Menurutnya, program ketahanan pangan jangan sampai hanya terprogram di atas kertas saja, namun tidak ada yang dilaksanakan.

“Saya berharap program ketahanan pangan ini betul-betul dilaksanakan. Baik itu bersifat fisik maupun non fisik. apa lagi jika menyangkut kepentingan daerah dan masyarakat banyak. Itu wajib dilaksanakan,” ujarnya Kamis (3/2/2022).

Abadi yang juga sebagai Ketua Fraksi PKB di DPRD Kotim ini mengingatkan jangan sampai karena program tersebut tidak terlaksana dan bahkan melewati tahun anggaran yang nantinya berujung menjadi Silpa.

Menurut Abadi, mewujudkan sistem ketahanan pangan yang kuat di wilayah ini harus dilakukan secara terus menerus agar kebutuhan masyarakat Kotim tersedia secara cukup, aman, merata dan terjangkau. Untuk itu ia mendorong Pemkab agar terus berusaha supaya sistem ketahanan pangan berjalan secara berkesinambungan serta bertumpu pada kemampuan diri sendiri.

“Memiliki ketahanan pangan yang kuat akan menjadi modal dasar pembangunan, dari sisi ekonomi ketahanan pangan yang mantap menjamin proses pembangunan akan berjalan lancar karena pangan cukup tersedia, sementara dari sisi sumber daya manusia, terwujudnya ketahanan pangan akan lebih menjamin SDM yang berkualitas,” terangnya.

Supaya sistem ketahanan pangan bisa berjalan, lanjutnya, maka peran masing-masing pihak harus berjalan secara adil serta memperoleh insentif yang wajar. Secara ekonomi produsen memperoleh keuntungan yang wajar sesuai mekanisme pasar, sedangkan konsumen dapat memperoleh pangan dengan harga yang terjangkau dan berkualitas.

Menurutnya, pemerintah sesuai peraturan perundangan akan turut campur apabila mekanisme pasar tidak berjalan normal, misalnya harga melonjak, terjadi kegagalan produksi atau produksi tidak cukup, terjadi spekulasi, bantuan untuk rakyat miskin dan terkena bencana alam, hambatan pada distribusi, baik karena alam maupun sarana atau prasarana distribusi yang rusak.

Pemerintah, baik pusat maupun daerah berperan menetapkan kebijakan, mendorong dan memfasilitasi peran serta masyarakat, memberikan edukasi, mendorong produksi pangan secara berkesinambungan, serta menciptakan iklim yang kondusif agar sistem ketahanan pangan dapat berjalan sehat dengan mendorong peran serta masyarakat.

“Masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan yang berperan sebagai produsen atau konsumen, melakukan perdagangan dan jasa, serta turut berperan dalam memberikan saran dan masukan kepada pemerintah agar sistem ketahanan pangan berjalan secara baik dan berkesinambungan,” ungkapnya.

Oleh sebab itu ujarnya, untuk membangun kondisi ketahanan pangan ini diperlukan arah dan kerangka kerja yang dapat menjadi dasar untuk mengelola berbagai aspek ketahanan pangan seperti pengembangan sistem produksi, distribusi dan pemasaran, diversifikasi pangan, pengawasan terhadap keamanan bahan pangan dan konsumsi yang cukup sebagai syarat memfasilitasi mengembangkan kualitas fisik SDM.

“Ini artinya membangun kondisi ketahanan pangan mempunyai banyak dimensi dan melibatkan banyak pihak sehingga perlu ada kebijakan yang menjadi landasan untuk interaksi dan koordinasi yang strategis,” tuturnya.c-may

Kementerian Pertanian Pastikan Stok Pangan Aman

<https://www.tribunnews.com/nasional/2022/02/03/kementerian-pertanian-pastikan-stok-pangan-aman>.

Penulis: Hasanudin Aco

Editor: Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemenuhan kebutuhan pangan dan menjaga [ketahanan pangan](#) menjadi tugas penting [Kementerian Pertanian](#) (Kementan).

Apalagi, Indonesia memiliki jumlah penduduk sangat besar dengan cakupan geografis yang luas dan tersebar.

Dengan kondisi tersebut, diperlukan pangan dalam jumlah mencukupi dan tersebar yang memenuhi kriteria konsumsi maupun logistik yang mudah diakses oleh setiap orang.

Menteri Pertanian (Mentan), [Syahrul Yasin Limpo](#), mengatakan pangan merupakan komoditas penting untuk membangun bangsa. Ketahanan pangan, menurut Mentan, merupakan masalah yang sangat serius.

Sebab, [ketahanan pangan](#) bagian dari sendi ekonomi masyarakat dan juga menjadi tolok ukur kesejahteraan rakyat.

"Ketahanan pangan hal sangat dasar. Bila terpenuhi, maka ekonomi dasar bisa tercapai. Dalam satu tahun belakangan, hanya Kementan yang menunjukkan tren positif dan peningkatan, dari hulu ke hilir," katan Mentan, Kamis (3/2/2022).

Menurutnya, pertumbuhan tersebut terlihat dari ekspor pertanian yang meningkat, devisa negara meningkat, masyarakat sejahtera. Selain itu, Kementan juga mengawal budidaya, pengolahan dan jual beli.

"Kami akan kawal dan dukung dalam hal menjaga ketahanan pangan," ujar Mentan.

Sementara Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP), Dedi Nursyamsi, mengatakan [ketahanan pangan](#) adalah suatu keniscayaan.

"Ketahanan pangan bisa meningkatkan kesejahteraan [petani](#). Ini adalah bentuk apresiasi bagi [petani](#) yang tak kenal lelah menjaga [ketahanan pangan](#)," ujarnya.

Bansos Matikan Fungsi Lumbung Pangan di Dukuh Kutukan Sragen

<https://www.solopos.com/bansos-matikan-fungsi-lumbung-pangan-di-dukuh-kutukan-sragen-1249044>

Solopos.com, SRAGEN — Semenjak pemerintah gencar memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, [lumbung](#) pangan di Dukuh Kutukan, Desa Kacangan, Kecamatan Sumberlawang, [Sragen](#), tutup. Lumbung itu tak lagi menyimpan gabah yang biasanya diakses warga yang membutuhkan saat musim paceklik.

Adanya bansos membuat warga Dukuh Kutukan jarang mengalami kesulitan pangan yang memaksa mereka harus meminjam beras di lumbung pangan. Karena tidak lagi berfungsi, lumbung pangan pun ditutup.

Berdasarkan pantauan *Solopos.com*, Rabu (2/2/2022), pintu lumbung pangan Dukuh Kutukan tertutup rapat. Di lumbung berkelir biru kuning tersebut bukan lagi gabah yang disimpan, melainkan gerabah.

“Tahun lalu masih ada untuk *nyimpan* gabah. Mulai tahun ini sudah tidak,” kata salah satu warga setempat, Ny. Citro, 58.

Dia menjelaskan sejumlah warga biasanya meminjam gabah saat musim paceklik. Maklum, Desa Kacangan biasanya hanya dua musim tanam padi.

“Warga yang butuh bisa ambil 10 kilogram lalu mengembalikan 11 kilogram setelah panen. Gabah dipilih karena bisa awet satu tahun. Kalau dalam bentuk beras tidak awet,” ungkapnya.

Lumbung pangan itu berjalan sudah lama, namun tahun ini lumbung ini tak lagi difungsikan sesuai tujuan awal. Pasalnya, warga yang memanfaatkan lumbung pangan ini terus berkurang sampai diputuskan tidak digunakan untuk menyimpan gabah lagi.

Menurut dia, ada beberapa faktor yang membuat warga tidak lagi mengakses lumbung, antara lain adanya program bantuan beras/sembako.

Anggota Komunitas Tilik Ibu Pertiwi Sukowati, Yoto Teguh Pambudi, menjelaskan lumbung padi biasanya untuk menjaga ketahanan pangan warga setempat pada musim paceklik. Kini, bantuan sembako/beras/bantuan lain dari pemerintah menggantikan fungsi lumbung.

“Akhirnya utang tidak untuk makan. Dulu utang beras untuk makan,” paparnya.

Gelar pangan murah TTI memudahkan masyarakat HSS penuhi kebutuhan pokok

<https://kassel.antaraneews.com/berita/310157/gelar-pangan-murah-tti-mudahkan-masyarakat-hss-penuhi-kebutuhan-pokok>

Kandangan (ANTARA) - Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), menggelar pangan Murah Toko Tani Indonesia (TTI), di Desa Malutu, Kecamatan Padang Batung untuk memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, Analis Dinas Ketahanan Pangan HSS, M Syaifullah, di Malutu, Kamis (3/2) mengatakan, gelaran pangan murah ini dijadwalkan bergilir di 11 kecamatan, yang berlangsung dari tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan 19 April 2022, pada setiap pukul 09.30-12.00 Wita.

"Gelar pangan murah TTI ini bertujuan untuk menyeimbangkan ketersediaan dan harga pangan, dengan membawa berbagai macam produk pangan, seperti bawang merah, bawang putih, gula pasir, teh celup, telur ayam, dan ayam potong," katanya, saat memberikan keterangan.

Dijelaskan dia, dengan adanya pangan murah ini diharapkan mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat, dalam memenuhi kebutuhan pokoknya dengan harga yang terjangkau.

Sekretaris Desa Malutu Fitriyati, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Pemkab HSS, khususnya Dinas Ketahanan Pangan HSS yang telah melaksanakan gelar pangan murah TTI ini, sehingga kebutuhan masyarakat di Desa Malutu bisa terpenuhi.

"Masyarakat sangat antusias menyambut gelar pangan murah TTI, dan tentunya kami berharap semoga ke depannya bisa selalu diselenggarakan," katanya.

Belajar Mengelola Pangan dari Kampung Adat Ciptagelar, Tradisi yang Sudah Berjalan Ratusan Tahun

<https://cianjurpedia.pikiran-rakyat.com/wisata-budaya/pr-1033643470/belajar-mengelola-pangan-dari-kampung-adat-ciptagelar-tradisi-yang-sudah-berjalan-ratusan-tahun>

Cianjurpedia.com – Sebuah kampung [adat](#) bernama [Kasepuhan](#) Ciptagelar di Kabupaten [Sukabumi](#), masih memegang erat tradisinya hingga saat ini.

Sebagian besar masyarakatnya bertani. Meskipun ada warga yang berprofesi lain seperti pedagang, buruh, dan pegawai, namun mereka tidak sepenuhnya meninggalkan lahan pertanian. Tradisi tersebut sudah dilakukan sejak ratusan tahun silam.

Salah satu komoditas pertanian yang dihasilkan adalah [padi](#). Bukan sekedar menanam dan memanen, bisa dibilang masyarakat [adat](#) Ciptagelar bersandar kepada budidaya [padi](#).

Hampir seluruh sendi-sendi kehidupan [adat](#) didasarkan kepada kalender siklus [padi](#). Padi juga dimaknai sebagai kehidupan.

Nilai luhur yang ditanamkan di sana adalah warga [Kasepuhan](#) Ciptagelar dilarang menjual [beras](#) atau [padi](#), bila seseorang menjual [beras](#) atau [padi](#), berarti menjual kehidupannya sendiri.

Terdapat sekitar 140 jenis varietas [padi](#) yang dikenal oleh masyarakat [adat](#) Ciptagelar. [Varietas](#) yang paling populer adalah tampeuy dan huma.

Seluruh varietas [padi](#) ini disimpan di lebih dari 8.000 lumbung yang ada di seluruh wilayah [Kasepuhan](#). Padi yang disimpan di lumbung tidak dipisahkan dari tangkainya, tetapi tetap tergantung dalam keadaan terikat menggunakan tali bambu (pocongan).

Cadangan Pangan Pemkot Sukabumi di Tahun 2022 Alami Penurunan

<https://jabar.pojoksatu.id/sukabumi/2022/02/03/cadangan-pangan-pemkot-sukabumi-di-tahun-2022-alami-penurunan/>

POJOKJABAR.com, Sukabumi – Diketahui sebelumnya alokasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) Kota Sukabumi pada tahun lalu berjumlah 23 ton, namun untuk tahun ini CPP yang tersedia mengalami penurunan.

“CPP kita mengalami penurunan dua ton dari tahun lalu. Tahun ini hanya 21 ton,” ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, Andri Setiawan saat ditemui usai menghadiri acara di salah satu Hotel, Rabu (2/2/2022).

Meskipun hanya tersedia sebanyak 21 ton, namun Andri berharap jumlah CPP tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat terjadi bencana atau pun gagal panen di tahun 2022 ini.

“CPP sebagai antisipasi jika terjadi bencana. Mudah-mudahan dengan 21 ton ini dapat mengatasi ketika terjadi bencana,”katanya.

Andri mengatakan, bantuan CPP tersebut akan diberikan kepada korban bencana sebanyak 32 kilo gram per orang.

Artinya jika dalam satu kelapa keluarga tersebut terdapat beberapa orang, maka bantuan pun akan disesuaikan dengan jumlah jiwa.

“Kalau misalkan dalam satu KK itu ada tiga orang , berarti tiga dilakali 3,3 kilogram. Seperti itu,”ucapnya.

Andri menyebutkan, serapan CPP tahun 2021 hanya berada di kisaran 90 persen dari alokasi sebanyak 23 ton. Artinya, hingga awal tahun 2022 masih tersedia CPP dari tahun anggaran sebelumnya.

“Sebelum anggaran 2022 berlangsung terjadi bencana dan alhamdulillah dapat kita tangani dengan sisa CPP yang ada,”katanya.

Andri mengungkapkan, jika kebutuhan CPP Kota Sukabumi mengalami kekurangan, maka DKP3 pun akan mengantisipasi nya dengan berkordinasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Kalau kurang kita akan berkordinasi dengan provinsi. Tahun kemarin pun kita mendapat bantuan penanganan dari provinsi,”pungkasnya. **(rs/pojokjabar)**

Antisipasi Kerawanan Pangan, DKP3 Sediakan CPP dan Akan Menganangkan Metode IP 400

<https://portal.sukabumikota.go.id/18328/antisipasi-kerawanan-pangan-dkp3-sediakan-cpp-dan-akan-menganangkan-metode-ip-400/>

Reporter : Riksan

Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPP) pada tahun 2021, terserap hampir 90 persen dari jumlah yang disediakan sebanyak 23 ton. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi, Andri Setiawan, saat ditemui pada Forum Komunikasi Publik Rancangan Awal RKPD pada hari Rabu, 2 Februari 2022 di Hotel Horison.

Dijelaskannya CPP diperuntukkan bagi korban bencana alam maupun untuk mengantisipasi kerawanan pangan dengan jatah CPP untuk satu jiwa sebanyak 32 kilogram beras. Pada tahun 2022, DKP3 telah menyalurkan pula CPP untuk korban bencana disalah satu kelurahan.

Ia menerangkan sejauh ini CPP yang disediakan oleh DKP3 bisa mencukupi kebutuhan selama setahun. Namun andai terjadi kekurangan, pihak DKP3 akan segera mengantisipasi hal tersebut melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Mengantisipasi kerawanan pangan serta penambahan jumlah penduduk, DKP3 juga telah mensosialisasikan Indeks Pertanaman (IP) Padi 400 yang merupakan program Kementerian Pertanian. Dalam waktu dekat, Kepala DKP3 menjelaskan akan segera dilakukan penganangan metode IP 400 yang memungkinkan panen padi sebanyak empat kali dalam setahun.

Minyak Goreng di Lampung Habis karena Kendala Distribusi

<https://m.lampost.co/berita-minyak-goreng-di-lampung-habis-karena-kendala-distribusi.html>

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Minyak goreng murah bersubsidi yang habis dinilai karena faktor pendistribusian dari distributor kepada para pedagang yang menjual minyak goreng di pasar-pasar yang ada di Lampung.

Pemerintah pusat telah membuat kebijakan penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk minyak goreng curah Rp11.500/liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500/liter dan minyak goreng kemasan premium Rp14.000/liter per tanggal 1 Februari 2022 sesuai Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan HET minyak goreng sawit.

Kebutuhan minyak goreng nasional pada 2022 sebesar 5,7 juta kiloliter. Untuk kebutuhan rumah tangga diperkirakan sebesar 3,9 juta kiloliter, yang terdiri dari 1,2 juta kiloliter kemasan premium, 231 ribu kiloliter kemasan sederhana, dan 2,4 juta kiloliter curah. Sedangkan, untuk kebutuhan industri adalah sebesar 1,8 juta kiloliter.

Kepala Bidang Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, M Zimmi Skil mengatakan kelapa sawit berlimpah dan setiap hari produsen melakukan produksi. Menurutnya, permasalahan saat ini ada pada proses pendistribusian yang memerlukan tim untuk melakukan pemerataan minyak goreng.

Misalnya distributor minyak goreng merk Fortune hanya memiliki 5 armada, sementara jumlah pasar banyak. Maka jadwal kunjungan harus bergantian. Tetapi, bila memang pedagang ingin cepat, bisa langsung membawa kendaraannya jemput minyak ke distributornya langsung.

"Disperindag dan Satgas Pangan serta Komisi II meminta percepatan distribusi di pasar tradisional. Akan tetapi masih proses distribusi bagi pedagang atau agen yang

tidak sabar bisa langsung ke distributor untuk ambil barangnya," kata Zimmi di ruang kerja, Kamis, 3 Februari 2022.

Menurutnya, ada sejumlah toko ketika dilaksanakan sidak distributornya sudah mendistribusikan, tetapi pedagang di toko tersebut tidak menjual/mendisplay minyak goreng sesuai HET. Zimmi menjelaskan Satgas Pangan meminta agar minyak goreng tersebut dijual kepada masyarakat umum. Selanjutnya, pemilik toko diminta untuk menandatangani pernyataan bahwa tidak akan melakukan perbuatan itu lagi.

Zimmi juga meminta kepada kabupaten/kota untuk cermat melakukan pengawasan minyak goreng di wilayahnya masing-masing. Kemudian, semua distributor juga diminta untuk berkoordinasi dengan seluruh Kepala UPTD Pasar di Kabupaten/Kota se Lampung. Dengan demikian, minyak goreng yang sudah didistribusikan tersebut bisa dipantau.

"Pemerintah Provinsi Lampung merupakan perpanjangan tangan dari pemerintah pusat yang melakukan pembinaan dan mensosialisasikan untuk mengawal regulasi yang ada. Nanti untuk penindakan ranahnya ada di Kepolisian," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Kasubdit I Industri Perdagangan (Indagsi) Dirkrimsus Polda Lampung, AKBP Catur Prasetyo mengatakan dalam rangka pengawasan dan penindakan, maka perlu bahu membahu untuk memastikan produsen, distributor, dan agen tidak ada penyelewengan. Langkah tegasnya yakni tahap awal memberikan peringatan dan teguran.

Bila memang benar terbukti melakukan pelanggaran penimbunan, sanksinya terancam UU Nomor 7 tahun 2014 Pasal 107 tentang perdagangan sanksi penjara 5 tahun atau denda Rp50 miliar kepada penimbun barang-barang kebutuhan pokok.

DKP3 Kota Sukabumi: CPP Diperuntukkan Bagi Korban Bencana Alam dan Antisipasi Kerawanan Pangan

FEB 3, 2022 eljabar

<https://eljabar.com/dkp3-kota-sukabumi-cpp-diperuntukkan-bagi-korban-bencana-alam-dan-antisipasi-kerawanan-pangan/>

SUKABUMI, eljabar.com — Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kota Sukabumi mengungkapkan, jika Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPP) pada tahun 2021 kemarin, penyerapannya mencapai 90 persen, dari jumlah ketersediaan mencapai 23 ton.

Sementara CPP untuk tahun ini, DKP3 tersebut hanya mendapatkan sekitar 21 ton. Artinya, jika melihat perbandingan dari tahun 2021 tentu saja berkurang.

“Untuk CPP di tahun 2021 terserap sekitar 90 persen, namun untuk tahun ini kita kebagian sebanyak 21 ton, dan itu memang alami penurunan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya,” ucap Kepala DKP3 Kota Sukabumi Andri Setiawan, Kamis (03/02/2022).

CPP sendiri lanjut Andri, diperuntukkan bagi korban bencana alam maupun untuk mengantisipasi kerawanan pangan dengan jatah CPP untuk satu jiwa sebanyak 32 kilogram beras.

“Jadi CPP itu untuk menanggulangi masyarakat yang terkena bencana ataupun rawan pangan. Dan satu jiwa mendapatkan 32 kilogram,” katanya.

Sejauh ini, lanjut Andri, CPP yang disediakan oleh DKP3 bisa mencukupi kebutuhan selama setahun. Namun andai terjadi kekurangan, pihak DKP3 akan segera mengantisipasi hal tersebut melalui koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Jika kurang kami akan langsung melakukan koordinasi dengan Provinsi Jabar,” pungkasnya. **(Anne)**

Percepat Pemulihan Ekonomi, Banyuwangi Berdayakan Warga Lewat 'Sistersay'

Baca artikel detikjatim, "Percepat Pemulihan Ekonomi, Banyuwangi Berdayakan Warga Lewat 'Sistersay'" selengkapnya <https://www.detik.com/jatim/berita/d-5927286/percepat-pemulihan-ekonomi-banyuwangi-berdayakan-warga-lewat-sistersay>.

Banyuwangi - Untuk memacu pemulihan ekonomi, Pemkab Banyuwangi memberdayakan para kelompok wanita tani (KWT). Salah satunya melalui Sistem Terintegrasi Ternak, Ikan, dan Sayur "Sistersay".

Program Sistersay merupakan penyediaan kebutuhan pangan lengkap bagi warga di desa. Program ini mengintegrasikan pertanian, peternakan, dan perikanan dalam satu lahan. Hingga pertengahan 2022 ditargetkan masing-masing kecamatan sudah memiliki satu lahan pertanian dengan program Sistersay.

"Dengan program ini satu lahan terintegrasi berbagai sektor ketahanan pangan. Tersedia tanaman sayuran, buah-buahan, perikanan sistem bioflok, serta kandang ternak dalam satu lahan," kata Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani, Kamis (3/2/2022).

Seperti yang dilakukan oleh KWT Desa Setail, Kecamatan Genteng, di Embung Kenitu. Di lahan persawahan yang dekat dengan bendungan irigasi tersebut, terdapat sistem terintegrasi mulai lahan sayuran seperti tomat, terong, dan cabai. Selain itu, di lahan tersebut terdapat budidaya lele melalui sistem bioflok, juga terdapat peternakan ayam.

Mendukung apa yang telah mereka lakukan, Bupati Ipuk memberikan bantuan 2.000 bibit sayuran, seperti tomat, terong, dan cabai. Juga sebuah kolam bioflok beserta 1.000 benih ikan lele, 50 ekor ayam dan kandang portable, serta 5 karton pupuk cair. Bantuan tersebut diserahkan Bupati Ipuk saat berkantor di Desa Setail dalam program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desa), Kamis (3/2/2022).

"Dengan program ini diharapkan bisa memacu pemulihan ekonomi di desa ini. Ibu-ibu tani bisa mengelola lahan pangan ini untuk memenuhi kebutuhan konsumsi harian keluarga, bahkan bisa juga menambah penghasilan," kata Ipuk.

Ipuk juga berpesan agar para penerima bisa merawat dan mengembangkan bantuan tersebut.

"Mohon dirawat dengan baik supaya semakin berkembang. Kalau panen jangan dijual semua, sisakan untuk kebutuhan konsumsi," kata Ipuk.

Program ini disambut positif oleh para wanita tani. Salah satunya Hindun (40), wakil ketua KWT Desa Setail. "Ini sangat membantu. Semuanya ada dalam satu lahan, ada sayuran, ikan, juga ayam yang menghasilkan daging dan telur. Ini bisa kami manfaatkan untuk memenuhi kebutuhan gizi warga kami. Bahkan kalau panen banyak, bisa dijual untuk menambah pemasukan keluarga," seringainya.

Sementara Plt. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Moh. Khoiri mengatakan, 'Sistersay' merupakan program penyediaan kebutuhan pangan lengkap bagi warga di desa. Utamanya di desa yang rawan stunting.

"Lahan ini kami prioritaskan di desa yang rawan stunting. Di desa tersebut, dipilih satu lingkungan yang dijadikan pusat percontohan. Dinas Pertanian akan memfasilitasi dan membantu sarana dan prasarana yang dibutuhkan," kata Khoiri.

Satu lahan 'Sistersay' akan mendapatkan bantuan dari dinas pertanian berupa 50 ekor ayam dan kandang portable, sebuah kolam lele bioflok termasuk benihnya, 1 unit peralatan hidroponik, serta benih sayurannya. Dengan demikian kebutuhan pangan sumber karbohidrat, vitamin, protein nabati dan hewani dapat tersedia di satu pekarangan.

"Lahan ini dikelola oleh pengurus yang telah kami tunjuk. Hasilnya bisa dikelola dan dimanfaatkan bersama. Misalnya, kalau ada yang butuh telur, bisa ambil telurnya. Kalau butuh lele, juga tinggal ambil sesuai kebutuhannya," kata Khoiri.

Dengan cara ini, diharapkan kebutuhan gizi warga bisa tercukupi sekaligus bisa menambah penghasilan perempuan tani.

Cegah Stunting, Pemkab Muara Enim Canangkan Kerja Sama dengan SEAMEO REFCON.

<https://infopublik.id/kategori/nusantara/602971/cegah-stunting-pemkab-muara-enim-canangkan-kerja-sama-dengan-seameo-recfon>

Muara Enim, InfoPublik - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim Emran Tabrani memimpin Rapat Pembahasan Rencana Kerja sama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim dan Southeast Asian Ministers Of Education Orgabization Regional Centre For Food And Nutrition (SEAMEO REFCON), Rabu (02/02) di Ruang Rapat Pangripta Sriwijaya Kantor Bappeda Muara Enim.

Direktur SEAMEO REFCON Muchtarin Mansyur mengatakan, SEAMEO REFCON merupakan pusat organisasi Menteri Pendidikan se-Asia Tenggara dan salah satu unit yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di bawah naungan Universitas Indonesia yang bergerak di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, rencana kerja sama ini akan difokuskan dalam hal optimalisasi sumber pangan lokal dalam penyelesaian masalah gizi khususnya Stunting, yang salah satunya bertujuan untuk menguatkan intervensi gizi spesifik dan gizi sensitive dalam penanggulangan stunting dalam program Anakku Sehat dan Cerdas (ECCNE) dengan pendekatan berbasis pangan melalui Panduan Gizi Seimbang Berbasis Pangan Lokal (PGS-PL).'

"Saya atas nama pribadi dan Pemkab. Muara Enim sangat menyambut baik usulan kerja sama dari SEAMEO REFCON ini, dan berharap ke depannya kita semua dapat bersinergi mencegah stunting baik itu dari sektor gizi maupun dari sektor pendidikan. Mari kita bentuk dari usia dini hingga sekolah menengah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di Kab. Muara Enim," ujar Pj Sekda.

"Oleh karena itu terkhusus kepada OPD terkait yang membidangi segera buat list kerja sama MOU yang akan disepakati oleh kedua belah pihak dalam hal ini Pemkab. Muara Enim dengan SEAMEO REFCON agar kemudian kita rembukan bersama tanggal untuk penandatanganan MOU tersebut," pungkas Pj Sekda.

Turut hadir K.a Balitbangda, Kadis Ketapang, Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan dan Kebudayaan serta Bagian Kesra.

